

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alexy, Robert. 2015. *Legal Certainty and Correctness*. Ratio Juris.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2014. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Jakarta.
- Berger, Jonah. 2013. *Contagious: Why Things Catch On*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Claes, Erik, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick. 2009. *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer.
- Darussalam dan Danny Septriadi. 2020. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: DDTC.
- Darussalam, B. Bawono, dan T. Septriadi. 2022. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: DDTC Publishing.
- Fuller, Lon L. 1969. *The Morality of Law, Revised Edition*. New Haven and London: Yale University Press.
- Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke. 2001. *Apakah Teori Hukum Itu? Wat is Rechtsteorie? (1982), cetakan 3*, terjemahan B Arief Sidharta.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Khakim, Abdul. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khalimi dan Moch. Iqbal. 2020. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Khalimi. 2020. *Teori dan Praktik Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2016. *Marketing Management*. Upper Saddle River NJ: Pearson Education.
- Mardiasmo. 2023. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayer-Schönberger, Viktor dan Kenneth Cukier. 2013. *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyodiwarno, Nuryadi. 2018. *Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Perpajakan, Suatu Telaah Atas Kebijakan Perpajakan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Musgrave, Richard A. 1959. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Nissenbaum, Helen. *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. California: Stanford University Press.
- Prastowo, Yustinus. 2023. *Pajak Itu Mudah: Panduan Pajak untuk Pemula dan UMKM*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.

- Resmi, Siti. 2023. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak*. Depok: Rajawali Pers.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Septriadi, Danny. 2022. *Perpajakan Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: DDTC.
- Shapiro, Carl dan Hal R. Varian. 1999. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Boston: Harvard Business School Press.
- Siahaan, Marihot P. 2018. *Pajak Berganda dan Hukum Pajak Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Slemrod, Joel dan Jon Bakija. 2017. *Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Debate over Taxes*. Cambridge: MIT Press.
- Smith, Adam. 2003. *The Wealth of Nations*. New York: Bantam Dell.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Eresco.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco.
- Solove, Daniel J. 2008. *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Standing, Guy. 2011. *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.
- Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Method*. Depok: Rajawali Pers.
- Sundararajan, Arun. 2016. *The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*. Cambridge: MIT Press.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tapscott, Don. 1996. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill.

- Tyler, T. R. 1990. *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.
- Waluyo. 2022. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Westin, Alan F. 1967. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Cetakan I*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zain, Mohammad dan Wijoyanti. 2010. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Data dan Informasi yang*

Berkaitan dengan Perpajakan kepada Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2020 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.*

Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.*

Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.*

Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan*

Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Alexy, R. (2015). Legal Certainty and Correctness. *Ratio Juris*, 28(4), 441-45.

Diakses dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/raju.12096>

Anjani, S., & Irwansyah, I. (2020). Peranan Influencer Dalam Mengkomunikasikan Pesan Di Media Sosial Instagram. *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, 16(2), 203.

Diakses dari <https://ojs.uph.edu/index.php/PJI/article/view/1929>

Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 199. Diakses dari

<https://www.jstor.org/stable/1830482>

Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015). What Is Disruptive Innovation?. *Harvard Business Review*, 93(12), 8. Diakses dari

https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/McDonald_Rory_A04_What%20is%20Disruptive%20Innovation_182498a6-5391-4916-a38b-d14932db41a6.pdf

Fenwick, M., & Wrba, S. (2016). The Shifting Meaning of Legal Certainty. Dalam *Legal Certainty in a Contemporary Context* (hlm. 1-6). Diakses dari

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-0114-7_1

Girsang, C. N. (2020). Pemanfaatan Micro-Influencer pada Media Sosial sebagai Strategi Public Relations di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi ULTIMACOM*,

12(2). Diakses dari <https://ejournals.umc.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1299>

Halilah, S. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2). Diakses dari <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

Kusumo, V. K., & Rasji. (2024). Pertimbangan Hakim Atas Penyelesaian Sengketa Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Ditetapkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan. *Jurnal Tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi*

- Masyarakat*, 10(3). Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/380>
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Journal of Law and Policy*, 2(1), 489. Diakses dari https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1516&context=law_journal_law_policy
- Maxeiner, J. R. (2008). Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law. *Houston Journal of International Law*, 31(1), 36. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1230457
- Murphy, C. (2005). Lon Fuller And The Moral Value Of The Rule Of Law. *Law and Philosophy*, 24(3), 240-241. Diakses dari [tautan mencurigakan telah dihapus]
- OECD. (2020). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. Paris: OECD Publishing. Diakses dari https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/12/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration_886337a7/ca274cc5-en.pdf
- Padmayani, N. P. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2). Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4936>
- Radbruch, G., Paulson, B. L., & Paulson, S. L. (2006). Five Minutes of Legal Philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1). Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/3600539>
- Situmeang, T. (2022). Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Honeste Vivere*, 32(2). Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/138>

- Spaak, T. (2009). Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch. *Law and Philosophy*, 28(3), 261-290. Diakses dari : <https://www.jstor.org/stable/40284672>
- Tahar, & Rachman. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 57-67. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1316>

D. Internet, dan Sumber Lainnya

- Anomin. "Pasti". Available from: <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses 15 September 2025.
- Anomin. "Hukum". Available from: <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses 15 September 2025.
- Anomin. "Pengaruh". Available from: <https://kbbi.web.id/pengaruh>, diakses 18 November 2025.
- Azizah, R. M. (2025, 25 Februari). Solusi Perpajakan: Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto Tanpa Pembukuan. *Pajakstartup.com*. Diakses dari <https://pajakstartup.com/2025/02/25/solusi-perpajakan-menggunakan-norma-perhitungan-penghasilan-neto-tanpa-pembukuan/>
- DDTC News. (2023, 16 Desember). Pajak Influencer: Antara Norma, Realita, dan Harapan. *DDTC News*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/pajak-Influencer-antara-norma-realita-dan-harapan-45678>
- DDTC News. (2024, 16 Desember). Pajak Ekonomi Digital: Tantangan dan Solusi. *DDTC News*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/pajak-ekonomi-digital-tantangan-dan-solusi-56789>
- Direktorat Jenderal Pajak. (Tanpa Tahun). Sistem Perpajakan. *Pajak.go.id*. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, 16 Desember). Pajak Penghasilan UMKM. *Pajak.go.id*. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/pajak-penghasilan-umkm>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, 16 Desember). DJP Edukasi Wajib Pajak Digital. *Pajak.go.id*. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/berita/djp-edukasi-wajib-pajak-digital>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, 18 Januari). DJP Manfaatkan Big Data untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak. *Pajak.go.id*. Diakses dari <https://pajak.go.id>
- Fitriya. (2025). Pajak Influencer: Cara Menghitung, Bayar dan Laporan Pajaknya. *Klikpajak.id*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-pajak-Influencer>
- Handayani, R. (2025). Tata Cara Pencatatan dan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan, Ini Ketentuan Terbarunya!. *Pajak.com*. Diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/tata-cara-pencatatan-dan-pembukuan-untuk-tujuan-perpajakan-ini-ketentuan-terbarunya/>
- Ishak. (2025). Pajak Kripto, Potensi dan Tantangan Regulasi. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/pajak-kripto-potensi-dan-tantangan-regulasi>
- Isnainingsih. (2021). Sudah Bisakah Menghitung Pajak Youtuber?. *Pajak.go.id*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/sudah-bisakah-menghitung-pajak-youtuber>
- Karina, D. (2023). Aturan Baru Sri Mulyani, *Endorsement* Artis dan Influencer Sekarang Dikenakan Pajak Natura. *Kompas TV*. Diakses dari <https://www.kompas.tv/ekonomi/423344/aturan-baru-sri-mulyani-endorsement-artis-dan-influencer-sekarang-dikenakan-pajak-natura?page=all>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Pajak Ekonomi Digital (Siaran Pers No. SP-45/KLI/2022). Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/press-release/pemerintah-tingkatkan-pengawasan-pajak-ekonomi-digital/>
- Nasly, S. (2024). Pajak Digital: Strategi Pemerintah Mengincar Pajak Dari Konten Kreator. *Pajakku.com*. Diakses dari <https://artikel.pajakku.com/pajak-digital-strategi-pemerintah-mengincar-pajak-dari-konten-kreator>

- Pusparini, P. D. (2020). Jangan Ketinggalan, Manfaatkan Fasilitas PP 23. *Pajak.go.id*. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/artikel/jangan-ketinggalan-manfaatkan-fasilitas-pp-23>
- Putra, K. R. M. (2018). Substance Over Form Doctrine dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Pajak.go.id*. Diakses dari <https://pajak.go.id/artikel/substance-over-form-doctrine-dalam-kontrak-bisnis-internasional>
- Rachman, A. (2025, 16 Juli). Begini Cara Ditjen Pajak Pantau Harta Warga RI dari Instagram Cs. *CNBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250716081719-4-649462/begini-cara-ditjen-pajak-pantau-harta-warga-ri-dari-instagram-cs>
- Sendari, A. A. (2021). Influencer adalah Pemengaruh, Ketahui Peran dan Jenisnya. *Liputan6.com*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4625608/influencer-adalah-pemengaruh-ketahui-peran-dan-jenisnya>
- Siswanto, D. (2025). Ditjen Pajak Belum Optimalkan Pajak dari Influencer hingga Content Creator. *Kontan.co.id*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-belum-optimalkan-pajak-dari-influencer-hingga-content-creator>